

KARYA ILMIAH

**PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
BERBASIS LINGKUNGAN DAN BUDAYA**

OLEH

**DR.DRS. I NENGAH PUNIA, MSI
NIP.196612311994031020**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
MANADO
2012**

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

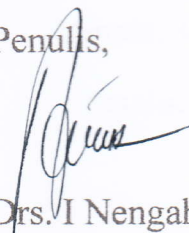
a. Nama : Dr.Drs. I Nengah Punia, MSi
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP : 196612311994031020
d. Pangkat/Golongan Ruang : Pembina , IV/a
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
f. Jurusan : Sosiologi
g. Program Studi : Sosiologi
h. Judul Karya Ilmiah : Pembangunan Ekonomi Indonesia Berbasiskan Lingkungan dan Budaya

Menyetujui :
Ketua Jurusan Sosiologi,



Drs. N. Kandowanko,MSi,-
NIP. 19610705 198903 1 005.-

Penulis,



Dr.Drs.I Nengah Punia, Msi.-
NIP. 196612311994031020.-



Mengetahui :
Dekan FISIP Unsrat,
Drs. Philip Morse Regar,MS.-
NIP. 19540503 198303 1 002.-

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kerta warenuGrahaNya karya ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Karya ilmiah ini berjudul “ Pembangunan Ekonomi Indonesia Berbasiskan Lingkungan dan Budaya “.

Karya tulis ini susun sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan menganalisis fenomena sosial-budaya yang terjadi di lingkungan sekita kita dan sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma erguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.

Dengan terselesainya penulisan penulisan karya ilmiah ini, maka perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman sejawat, teristimewa teman-teman di jurusan sosiologi yang telah mendorong kami untuk menulis tema ini, namun demi kesempurnaan dan kedalaman pembahasan karya ilmiah ini, kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai aspek keilmuan.

Manado, Okteber 2012

Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	4
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pembangunan Ekonomi Indonesia	5
B. Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Lingkungan	9
C. Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Budaya	12
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan	16
B. Saran	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak ekonomi, sosial dan budaya telah dikukuhkan oleh masyarakat Internasional pada tahun 1966 dalam sebuah perjanjian (*kovenan*) yaitu ” *International Covenant of Economic, Social dan Culture Rights* ”. Perjanjian internasional ini dibuat berpasangan dengan ” *International Covenant of Civil and Political Rights*, namun dalam perjalanannya kedua kovenan tersebut dipisahkan menjadi dua akibat dari adanya kompromi antara Negara-negara liberal versus Negara-negara sosialis, yang pada saat itu sedang terlibat perang dingin.

Kedua kovenan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsip, yang membawa akibat pada tataran pemenuhannya. Di mana kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya sudah diformulasikan secara positif dan bersifat non *justiciable*, akan tetapi kovenan hak sipil dan politik dirumuskan secara negatif dan bersifat *justiciable* atau *immediate*. Oleh karena demikian di lingkungan ahli hukum hak asasi manusia timbul suatu anggapan bahwa haka-hak dalam kategori hak ekonomi tidak merupakan hak, melainkan lebih sebagai cita-cita, yang pemenuhannya sangat tergantung dari persediaan sumber-sumber ekonomi di negara-negara bersangkutan. Sehingga pemenuhan kedua perjanjian (*Covenant*) ini dianggap dapat dipisahkan, seperti apa yang terkemuka dalam teori *trade-off*.

Saat ini teori *trade-off* sudah tidak relevan, perkembangan pemikiran dewasa ini lebih mementingkan keterpaduan dan saling ketergantungan antara kedua kategori yakni ; hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil, politik, yang lebih dikenal dengan teori *indivisibility of rights*. Isi pokok dari teori *indivisibility of rights* adalah kedua kategori perjanjian (*kovanan*) internasional tersebut dapat dipisahkan pemenuhannya, namun keduanya saling ketergantungan. Misalnya pemenuhan atas hak pekerjaan (*rights to work*) sebagai suatu contoh, yang mana pemenuhannya sangat tergantung pada tingkat kebebasan untuk menyatakan pendapat, berorganisasi dan berkumpul, maka ada kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan negara dibidang pekerjaan.

Begitu pula sebaliknya, dengan adanya pekerjaan, terbuka kesempatan untuk melibatkan diri dalam perumusan kebijakan politik (Baswir, dkk. 2003 : VI).

Dua kovenan internasional tersebut di atas sudah mencerminkan dengan jelas bahwa pembangunan perekonomian dunia, termasuk Indonesia hendaknya dapat memperhatikan kelestarian lingkungan (alam) dan budaya. Sebab pembangunan perekonomian tanpa memperdulikan lingkungan maupun budaya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan alam maupun budaya-budaya tradisional yang ada di suatu daerah/negara tertentu. Bahkan pembangunan perekonomian yang berbasis kapitalis sudah mempercepat terjadinya proses pemanasan global, sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan alam semakin meluas, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, udara, dan bumi. Keserakahan global dengan mengembangkan pola hidup konsumtif manusia lewat propaganda gaya hidup dari media masa, cetak maupun elektronik, lebih menjadikan manusia tidak peduli akan keseimbangan alam dan pelestarian budaya adi luhung. Dengan kesemena-menaan manusia terhadap alam lingkungan dan lenyapnya budaya-budaya adi luhung, tidak heran apabila alam kemudian akan mengalami kerusakan ekosistemnya dan hancurnya budaya tradisional yang adi luhung sehingga berbalik menghancurkan manusia secara fisik maupun non fisik.

Melihat fenomena pembangunan ekonomi dewasa ini yang sudah tidak mengindahkan kelestarian alam lingkungan dan budaya, maka perlu ada komitmen bersama untuk menyusun kembali sebuah strategi kebudayaan sebagai usaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan demi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini (Wibowo, 2007 : 9). Oleh karena itu, masalah lingkungan dan budaya adalah masalah moral atau persoalan prilaku manusia yang tidak bertanggungjawab. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sekarang, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar diakibatkan oleh prilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, udara, hutan, atmosfer dan sebagainya bersumber pada prilaku manusia yang serakah, tidak peduli dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena demikian persoalan-persoalan pembangunan perekonomian yang terdapat pada tingkat individu, masyarakat, negara, dan internasional tidak dapat dipecahkan hanya lewat ilmu

ekonomi saja, akan tetapi harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, budaya dan sebagainya.

Stinchombe (1983) mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek ekologis/lingkungan (Stinchombe dalam Damsar, 1997 : 11). Peringatan tersebut patut diperhatikan karena suatu aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan aspek ekologi akan menghadapi hambatan dan tantangan oleh masyarakat kontemporer yang nampaknya semakin peka terhadap isu-isu global tentang lingkungan hidup maupun pemanasan global. Bahkan sudah ada suatu keberanian masyarakat dunia untuk memboikot terhadap produk-produk yang menggunakan bahan baku dari kayu hutan tropis (seperti kayu lapis dari Indonesia), terutama negara-negara Eropa. Misalnya pemboikotan itu juga diiringi oleh pembakaran beberapa pompa bensin *Shell* tahun 1995 oleh warga Jerman, yang beranggapan bahwa perusahaan *Shell* tersebut sudah mencemari lingkungan laut Utara. Dari contoh itu sudah tergambar dengan jelas bahwa betapa pentingnya aspek ekologis terhadap pembangunan ekonomi.

Menurut Arne Naess (1993) bahwa krisis lingkungan (ekologi) dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang fundamental dan radikal (Naess (1993) dalam Keraf, 2002 : xiv). Ini berarti bahwa krisis lingkungan seperti sekarang ini sangat diperlukan sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya mementingkan diri sendiri (sistem kapitalis), akan tetapi perlu mengembangkan budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya sangat dibutuhkan adanya etika lingkungan hidup yang dapat menuntun manusia untuk berinteraksi dengan alam semesta yang dalam kearifan lokal dan budaya Bali konsep *palemahan* (bungan manusia dengan alam). Krisis lingkungan yang kita sedang hadapi dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem, sehingga perlu adanya pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam, manusia lain dan keseluruhan ekosistem.

Fenomena dan beberapa pokok pikiran para ahli yang telah penulis ungkapkan dalam latar belakang inilah yang membangkitkan naluri ilmiah penulis untuk

mengangkat fenomena ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul ” Pembangunan Ekonomi Indonesia Berbasiskan Lingkungan dan Budaya ”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian pada hakekatnya merupakan bentuk lain dari pernyataan permasalahan seperti yang terdapat dalam latar belakan masalah. Istilah permasalahan di sini bukan berarti sesuatu yang mengganggu/menyulitkan, tetapi sesuatu yang masih ” gelap ”, sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang ingin diketahui. Maka dengan demikian penulis dapat merumuskan masalah penulisan paper ini yaitu : Apakah pemerintah Indonesia sudah melaksanakan pembangunan ekonomi yang berbasiskan lingkungan dan budaya ? Bagaimana keterkaitan pembangunan ekonomi dengan lingkungan dan budaya ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan penulisan yang telah penulis rumuskan dan agar penulisan ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuannya sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dengan jelas proses pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasiskan lingkungan dan budaya. 2. Untuk melihat keterkaitan pembangunan ekonomi Indonesia dengan lingkungan dan budaya.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, dapat diungkapkan bahwa penulisan paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (kegunaan) secara teoritik tentang ” pembangunan ekonomi Indonesia berbasiskan lingkungan dan budaya, terutama pada pemerintah, penulis dan para pelaksana pembangunan ekonomi, lingkungan dan budaya ”.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan sebagai usaha untuk merubah masyarakat akan dapat melahirkan fenomena yang berlawanan. Di sisi lain pembangunan menjadi kebanggaan bangsa karena melahirkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dipihak lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan melahirkan kesenjangan ekonomi, sosial, budaya dan politik semakin meluas. Pemerataan dan keadilan di dunia (Indonesia) belum menjadi kenyataan, tetapi hanya merupakan angan-angan belaka, apakah itu dapat atau tidak dicapai yang sudah dijadikan landasan dasar pembangunan ekonomi Indonesia.

Masalah kesenjangan tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di negara-negara berkembang, di mana pertumbuhan ekonomi sebagian besar dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat menikmati sebagian kecil hasil pertumbuhan ekonomi. Realitas ketimpangan seperti ini sudah nampak sejak tahun 1980-an (Mas'ood, 1999 :12). Prinsip utama pembangunan di Indonesia adalah menciptakan suasana politik yang stabil sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya , kegagalan pemerintahan Orde Lama dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena adanya situasi sosial dan politik yang tidak kondusif sehingga semua perbedaan diharamkan oleh nilai budaya bangsa karena tidak dapat mendukung kehidupan bangsa yang harmonis. Sesungguhnya perbedaan perkembangan ekonomi era Orla dan Orba hanya terletak pada kebijaksanaan luar negeri yang memanfaatkan hutang dan investasi asing di Indonesia. Kebijakan Orla tidak memanfaatkan sebanyak-banyak hutang luar negeri untuk pambangan bangsa, akibatnya pembangunan ekonomi pada saat itu sangat lamban, namun kebijakan Orba sangat merespon dan memanfaatkan hutang luar negeri maupun investasi asing, sehingga pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan.

Perekonomian nasional yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian negara-negara di dunia, ini membuktikan kisah nyata kesuksesan suatu perekonomian nasional yang tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif klasik, tetapi dipengaruhi oleh banyak hal lainnya, seperti ; perusahaan

3

sebagai pelaku utama ekonomi. Ketatnya persaingan global dapat mengakibatkan para pengusaha nasional mengalami kemerosotan pangsa perdagangan, sehingga para ekonom dan pengusaha memprediksi bahwa titik lemah perdagangan internasional dan perekonomian Indonesia berada pada pola pengendalian pasar yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada tingkat pelaksanaan (Mas'ood, 1999 : 127). ” Kualitas intervensi pemerintah ” sudah mulai dipertanyakan oleh banyak pihak, berkaitan dengan melemahnya daya saing industri Indonesia di luar negeri. Banyak ”variasi” regulasi dan intervensi pemerintah terhadap kegiatan perdagangan dan industri dipandang sebagai imbas penurunan ”kualitas” intervensi itu sendiri.

Berkaca dari histori ilmu ekonomi Yunani bahwa *Dictrine natural law dan natural liberty* adalah merupakan dasar bagi berkembangnya teori ekonomi neoklasik, yang pada dasarnya memberikan suatu prasyarat bagi sistem ekonomi suatu bangsa, serta adanya pembatasan peran pemerintah di dalam kegiatan perekonomian (Mas'ood, 1999 : 128). Dari pernyataan tersebut di atas bahwa pemerintah dimasa lalu (Yunani) lebih sering dipandang sebagai ’musuh’ daripada sebagai ’kawan’ di dalam kegiatan perekonomian suatu bangsa, karena campur tangan pemerintah dianggap sebagai pengganggu mekanisme pasar. Bahkan dari tangan pemerintah itu sendiri akan lahir *monopoly power* yang dapat merusak persaingan pasar bebas. Sesungguhnya gerakan monopoli sudah mulai sejak tahun 1776 yang disponsori oleh tokoh ekonomi dunia Adam Smith. Ia mengungkapkan bahwa ada kecenderungan masyarakat bisnis untuk melakukan usaha yang merugikan kepentingan publik, oleh karena itulah Adam Smith berpendapat bahwa monopoli adalah ”musuh besar” bagi perekonomian yang baik (Mas'ood, 1999 : 129).

Mekanisme pasar yang didasarkan atas doktrin ’ *natural low* ’ pada dasarnya kurang memperhatikan peran masyarakat pada umumnya dan sektor publik pada khususnya, di mana peran pemerintah sebagai agen dalam *public sector servis* menjadi semakin nyata sehingga pandangan anti pemerintah semakin hilang. Konsep ini memandang pemerintah tidak lagi sebagai musuh tetapi sebagai kawan bagi suatu perekonomian bangsa, karena dengan adanya campur tangan pemerintah justru dipandang sebagai faktor pendorong perkembangan perekonomian, khususnya bagi negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Artinya campur tangan pemerintah

tidak selamanya berdampak negatif pada perekonomian masyarakat. Campur tangan dan regulasi pemerintah dapat dibenarkan apabila ada alasan-alasan seperti yang dikemukakan oleh Kahn (1989), antara lain : 1) intervensi dan regulasi pemerintah dalam hal industri yang merupakan infrastruktur bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan (industri strategis), 2) intervensi dan regulasi dilakukan pemerintah, karena untuk melindungi *natural monopoly* yang bisa berjalan apabila tidak dalam keadaan merugi apabila hanya ada *supplir* tunggal dalam perekonomian, 3) pemerintah melakukan intervensi dan regulasi, karena adanya "pesaingan pasar" yang tidak berjalan dengan seharusnya.

Ketiga alasan tersebut di atas, di samping pertimbangan persatuan dan kesatuan, telah memberikan justifikasi yang kuat tentang keberadaan pemerintah di dalam perekonomian pasar terbuka saat ini. Namun demikian perlu diingat bahwa dalam kehidupan ekonomi yang sedang berkembang dan semakin terbuka, kegiatan usaha dan industri mulai bervariasi. Perdagangan internasional telah banyak mendorong lahirnya produk-produk perdagangan baru yang pada masa lalu tidak pernah terbayangkan akan terjadi.

Kemunduran peran pemerintah di dalam perekonomian nampak sangat jelas terjadi di Indonesia sejak era keterbukaan ekonomi mulai dicanangkan. Serial deregulasi sektor manufaktur yang dimulai sejak tahun 1986, dan masih terus diberlakukan sampai saat ini, pada dasarnya telah berhasil mempercepat berlakunya sistem pasar gaya *laissez fair* di hampir semua sektor ekonomi dan industri. Hal ini membuktikan bahwa semakin menonjolnya kepentingan 'individu' yang segera berhadapan dengan kepentingan 'regulator'. Sementara yang disebut "kepentingan dan prioritas nasional" sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat proses deregulasi. Ukuran ketahanan ekonomi nasional yang dahulu diukur dengan *self sefficiency* pada segala bidang industri sekarang telah berubah pada cadangan devisa dan penerimaan ekspor. Akibatnya pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan berdaya saing industri telah menjadi agenda utama setiap pembicaraan negara (Mas'eod, 1999 : 132). Secara teoritis bahwa ketika masyarakat sudah berubah menjadi sangat dinamis, peran pemerintah sebagai penggerak sudah tidak diperlukan lagi, apalagi ketika mekanisme pasar sudah mampu menyelesaikan semua

permasalahan sendiri, regulasi pemerintah menjadi *second best policy option*. Kenyataannya, keterlibatan dalam bidang industri di Indonesia masih sangat banyak, misalnya saham pemerintah masih sangat banyak diberbagai sektor manufaktur dan industri jasa lainnya.

Bila kita menelusuri histori sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau suatu negara biasanya berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lebih tinggi, sehingga suatu sistem ekonomi dinamakan tahapan ekonomi. Ukuran kemajuan yang digunakan dari suatu tahapan ke tahapan lainnya beraneka ragam, ada yang menggunakan penalaran, barang kapital, alat tukar yang digunakan, motifasi yang mendorong kegiatan ekonomi. Menurut Werner Sombart (dalam Soetrisno, 1984 :118) mengungkapkan bahwa sistem ekonomi itu ada tiga tahap yaitu : 1) tahap atau sistem ekonomi sebelum kapitalis, dimana motivasi yang mendorong kegiatan ekonomi yang sangat kuat hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup sebagai manusia biologis, budaya, etika dan agama. 2) tahap atau sistem kapitalis/lebih maju, di mana kegiatan ekonomi didorong oleh motivasi untuk mencari laba, mengejar keuntungan (provit motive). 3) post-kapitalisme, di mana motivasi kegiatan ekonomi telah tertuju pada koordinasi dan kepentingan seluruh masyarakat. Perubahan dari satu tahap/sistem ke tahap yang lebih tinggi tidak secara drastis/radikal melainkan melalui masa transisi atau metamorfosis, di mana pada tahap transisi sifat yang dibawahnya masih kuat dan tahap di atasnya masih lemah, kemudian baru tahap di bawahnya semakin melemah dan sifat yang di atasnya semakin menguat, demikian seterusnya. Di Indonesia menurut Boike (dalam Soetrisno, 1984 : 119) dilihat ada dua bentuk sistem ekonomi yang sama-sama kuat dan saling berdampingan satu sama lain yakni : 1) sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat asli yang masih pra-kapitalisme, 2) sistem ekonomi yang diimport atau dibawa dari Barat yang telah dalam bentuk kapitalisme, sosialisme/komunisme.

Kedua sistem ekonomi tersebut saling hidup berdampingan secara kuat dan bukan dalam bentuk transisional, karena kedua sistem ekonomi itu lebih menekankan pada dua bentuk masyarakat yaitu masyarakat asli Indonesia dan masyarakat Barat atau yang sudah terkena pengaruh Barat, maka lebih dikenal dengan sebutan masyarakat yang bersifat dualisme. Dengan bentuk masyarakat yang bersifat dualis (*dual society*)

diperlukan ilmu ekonomi yang berbeda untuk yang satu dengan yang lainnya. Pada masyarakat yang berbasiskan sistem ekonomi asli Indonesia (budaya Indonesia) peran ilmu ekonomi hampir tidak ada, walaupun ada sangat sedikit, sehingga kemajuan yang diperolehnya juga tidak begitu nampak. Berbeda halnya dengan masyarakat yang menganut sistem kapitalis, bahwa ilmu ekonomi menjadi dominan, karena untuk mencapai kemajuan hendaknya mampu mengaplikasikan ilmu ekonomi yaitu mengeluarkan sedikit mungkin dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk dapat menjalankan prinsip ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 33 yaitu perekonomian berdasarkan atas demokrasi perekonomian dan kemakmuran masyarakat umum diutamakan, maka Indonesia harus berani menjalankan sistem ekonomi yang ketiga yakni sistem ekonomi post-kapitalis, seperti yang telah diutarakan oleh Wemer Sombart, sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai seperti yang sudah tercantum dalam Pancasila dan UUD 45.

B. Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Lingkungan

Alam semesta beserta isinya adalah merupakan karunia Tuhan kepada manusia untuk hidup dan berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, termasuk berbagai macam kebutuhan hidupnya. Kemajuan masyarakat kiranya dapat dilihat dari kemajuan rasionalitas, lahirnya lembaga-lembaga kepemilikan, lembaga hukum sehingga akan ada pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan kekayaan alam sebagai sumber penghidupan manusia. Pembatasan-pembatasan tersebut menyangkut perorangan, keluarga, kelompok masyarakat maupun terhadap suatu bangsa/negara. Sesungguhnya kemajuan suatu masyarakat/bangsa dapat terlihat dari penggunaan rasio yang nampak dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber ekonomi dan perkembangan teknologi yang dipergunakan oleh pelaku ekonomi. Dilihat dari kekayaan alam yang tersedia, baik potensi maupun latensial, Indonesia termasuk '*rich country*' atau negara kaya. Kekayaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek yakni; aspek kekayaan laut, tambang, mineral, hutan, dan kekayaan alam lainnya.

Sumber kekayaan alam yang merupakan sumber kehidupan manusia, secara biologis adalah merupakan satu kesatuan sistem yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya dan hal itu sudah diketahui oleh manusia, namun manusia sering

merusak jalinan yang harmonis itu demi kepentingan pribadinya. Pada hal jalinan tersebut tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi bersifat spiritual/kasat mata (*konsep Tri Hita Karana*), misalnya hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan hal-hal yang bersifat kasat mata (Tuhan). Keseimbangan dan pengaturan dapat dikatakan meliputi keseluruhan aspek kehidupan, keseimbangan dalam kebutuhan manusia, kebutuhan tumbuh-tumbuhan dan keseimbangan mikrokosmos maupun makrokosmos.

Bila kita lihat darisegi keseimbangan mikrokosmos (manusia) apabila manusia dapat mengetahui dan memperhatikan alam atau Tuhan sesungguhnya telah menciptakan keseimbangan, dan bila keseimbangan itu terganggu maka keseimbangan jiwa dan raga juga akan terganggu. Misalnya soal makanan, Tuhan telah menciptakan keseimbangan terhadap efeknya bagi kesehatan dan kemajuan manusia, seperti buah salak terdapat keseimbangan antara buah yang dimakan dengan kulit ayamnya, buahnya dapat menyebabkan ke WC tersendat, dan kulit ayamnya dapat menghilangkannya dan sebagainya. dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan juga keseimbangan anantara kebutuhan individu dengan kepentingan masyarakat, tetangga, antara kepentingan keluarga dan dinas, antara kepentingan keluarga dan negara, antara kelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Salah satu tugas pemerintah berkaitan dengan keseimbangan alam lingkungan adalah mengatur keseimbangan ini dengan jalan memberikan tunjangan pensiun, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain kepada masyarakat atau keluarga (Soetrisno, 1984 : 40).

Keseimbangan makrokosmos antara lain meliputi : 1) keseimbangan antara pngrusakan manusia terhadap lingkungan (polusi) dengan usaha pengembaliannya, 2) keseimbangan antara kehidupan manusia dengan kehidupan makhluk biologis lainnya yang nampak maupun yang tidak nampak, 3) keseimbangan antara pngrusakan sumber daya alam dengan penciptaannya, 4) keseimbangan dengan benda alam satu dengan yang lainnya, 5) keseimbangan antara unsur-unsur emperik dengan unsur-unsur metafisika, 6) keseimbangan antara planet satu dengan planet lainnya, 7) keseimbangan antara makhluk dengan khaliknya atau antara yang diciptakan dengan penciptanya, 8) dan lain sebagainya.

Keseimbangan sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan, tapi karena manusia tidak mengetahui atau tidak mau mengetahuinya dan mengikuti, maka segala macam keseimbangan yang telah diciptakan oleh Tuhan akan menjadi terganggu. Dalam ajaran agama Hindu dan Buddha dan agama lainnya ; apabila manusia mampu dan mau menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar sudah pasti akan tercipta keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos atau keseimbangan antara alam semesta dengan manusia, yang dalam konsep Hindu disebut dengan istilah "*moksa dan jagadhita*" yaitu keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan perkembangan penduduk dengan alam lingkungan, keseimbangan antara generasi tua dengan generasi muda, keseimbangan antara material dengan spiritual, keseimbangan intelektual dengan unsur-unsur jiwa yang lainnya, sehingga dapat melahirkan suatu keharmonisan (serasi, selaras, dan seimbang). Bila keseimbangan-keseimbangan tersebut tidak dapat diciptakan di muka bumi ini, maka akan lahir suatu dis-harmonis, yang secara lahiriah maupun batiniah menimbulkan kekacauan secara individu maupun kelompok. Oleh karena sangat diperlukan adanya campur tangan di luar individu sebagai satuan kecil masyarakat seperti organisasi formal atau pemerintah. Dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, pemerintah hendaknya mampu berfungsi sebagai manager, katalisator; di mana individu dan kelompok sebagai partisipan memiliki peran yang sangat penting dalam usaha untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan hidup.

Adanya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan adalah merupakan salah satu sasaran pembangunan Nasional dan sekaligus sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Indikator seperti itu sesungguhnya tidak tepat, karena peningkatan kesejahteraan fisik dalam bentuk PDB sering kali diikuti oleh adanya penurunan kualitas lingkungan hidup manusia, seperti ; penurunan kualitas air, udara, tanah, hutan dan sebagainya, yang kesemuanya itu akan bermuara pada bencana alam dikemudian hari. Oleh karena demikian kualitas lingkungan amat penting untuk dipertimbangkan dalam mengukur kelayakan hidup manusia (Baswir, Dkk. 2003 : 200). Misalnya salah satu contoh dalam masalah lingkungan hidup yang kaitannya dengan pembangunan ekonomi adalah gencarnya penggunaan pestisida sebagai upaya melindungi tanaman dari hama penyakit dan meningkatkan

hasil produksi pertanian. Konsekuensinya banyak ditemukan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam pestisida mencemari air, tanah, dan juga makhluk hidup lainnya (manusia, binatang, tumbuhan), maka dengan demikian hendaknya pemerintah Indonesia memperhatikan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Artinya pembangunan dan peningkatan perekonomian rakyat tetap jalan sesuai dengan program yang sudah direncanakan, namun tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Bahkan kalau perlu pemerintah Indonesia harus berani menolak sistem pembangunan ekonomi yang berbasis kapitalisme, mengingat substansi kapitalisme tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia (Pancasila) yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak daripada kelompok atau individu. Memang sistem pembangunan ekonomi yang berbasis kapitalis lebih mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi lebih mempercepat pula proses kerusakan lingkungan hidup yang ada di muka bumi ini, oleh karena demikian hendaknya pemerintah Indonesia dalam menjalankan pembangunan ekonomi secara berimbang antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

C. Pembangunan Ekonomi Berbasis Budaya

Pembangunan ekonomi sebenarnya tidak akan bisa dilepaskan dari pemenuhan hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta hak untuk menikmati maupun ekspresi budaya, karena pemenuhan hak tersebut sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat (manusia) untuk berekspresi dan berkreasi mengembangkan budaya dengan fasilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Oleh karena demikian, pemerintah Indonesia sebagai pengemban amanat rakyat berkewajiban untuk melindungi ekspresi-ekspresi iptek maupun budaya rakyat seperti apa yang sudah diamanatkan oleh Kovenan (perjanjian) Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan budaya yakni ; tentang hak-hak rakyat untuk dapat menikmati kemajuan iptek dan budaya.

Kovenan (perjanjian) tentang Hak-hak Ekonomi menyebutkan bahwa ; 1) negara-negara penandatangan mengakui hak bagi semua untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, menikmati/memanfaatkan kemajuan iptek, dan menikmati perlindungan atas kepentingan moral maupun ekspresi budaya, seperti karya sastra,

seni, penelitian ilmiah dan lainnya. 2) untuk merealisasikan hak-hak ini secara penuh, termasuk kebutuhan untuk konservasi, pengembangan, difusi iptek dan budaya. 3) negara peserta kovenan ini mengakui kebebasan yang tidak dapat diingkari untuk melakukan penelitian ilmiah dan kreatif. 4) negara-negara kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari *encouragement* dan pengembangan kontak internasional dan kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan budaya (Baswir, dkk. 2003 : 211-212).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka budaya manusia mengalami pergeseran-pergeseran dan perubahan, karena budaya itu adalah merupakan suatu proses untuk dikelola dan diarahkan. Artinya, kebudayaan adalah strategi dan sekaligus proses belajar untuk menunjukkan bagaimana manusia secara sadar dan terarah mengembangkan kebudayaan sehingga dapat mencapai sasaran maupun makna (Baswir, dkk. 2003 : 213). Jadi keterpautan antara perkembangan iptek dan perubahan budaya tidak bisa terlepas, keduanya berjalan seiring dalam proses transformasi sosial maupun ekonomi. Dalam keterkaitan seperti ini, iptek dapat dianggap sebagai sebuah kendaraan yang berfungsi untuk mendorong proses terjadinya pembangunan dengan berbagai karakteristiknya, sedangkan budaya adalah merupakan hasil dari proses perubahan/pendewasan norma-norma dan tatanan kehidupan masyarakat, seiring dengan proses perkembangan iptek dan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, terutama pada Repelita V ada usaha untuk melakukan perubahan dalam bidang pembangunan industri sub-stitusi impor ke industri teknologi tinggi (*high technology*), seperti industri pesawat terbang, kimia, elektronika, transportasi darat, peralatan pertanian dan sebagainya, di bawah kemando Habibie. Pertimbangannya, kalau tidak ada transformasi teknologi yang berkesinambungan maka Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara lain (Habibie (1986), dalam Baswir, dkk.2003 : 215). Pada hal pendekatan teknologi tinggi tersedbu sangat bertentangan dengan hukum-hukum ekonomi yang sangat dipercayai oleh ekonom Indonesia.

Perbedaan dan polemik tentang visi pembangunan ekonomi Indonesia inilah melahirkan priksi-priksi dikalangan ekonom, bahwa dalam suasana ekonomi yang

3

langka devisa, industri yang berteknologi tinggi dianggap sebagai proyek yang tidak efisien dan penuh subsidi negara, sehingga industri yang berteknologi tinggi identik dengan industri yang padat modal. Namun dikalangan teknokrat bahwa teknologi tinggi itu sangat diperlukan, kalau tidak ingin ketinggal dengan negara-negara berkembang lainnya. Dan oleh sebab itu perlu disubsidi oleh pemerintah, karena hasil dari industri tinggi itu akan mampu menjadi lokomotif dalam peningkatan pendapatan negara (Baswir, dkk. 2003 : 216). Bila kita cermati dan amati perjalanan maupun perkembangan industri tinggi di atas, sesungguhnya sudah melupakan transformasi budaya sebagai proses sosial yang semestinya harus diperhatikan pemerintah. Kenyataannya pemerintah tidak memperhatikan substansi budaya sebagai cerminan spritualitas bangsa sehingga alih teknologi yang diterapkan di Indonesia menjadi gersang, kering dan tidak berpihak pada kelestarian lingkungan, seperti eksploitasi tambang emas, gas, minyak di berbagai daerah selalu merusak lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

Kegagalan proses pembangunan ekonomi karena adanya keterlambatan untuk menyadari bahwa pembangunan, termasuk kemajuan iptek bukan hanya berdampak pada pertumbuhan materi (ekonomi) tetapi berdampak juga pada perubahan sosial dan budaya yang sangat mendalam di masyarakat. Contoh misalnya revolusi hijau sangat jelas untuk menggambarkan bagaimana proses penerapan teknologi atas nama pembangunan, sesungguhnya ada usaha untuk mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat petani di pedesaan. Namun untuk dapat memaknai pembangunan ekonomi dan budaya sebagai sesuatu yang dikelola dan diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dan bermakna maka harus melibatkan masyarakat secara penuh. Keterlibatan rakyat dalam hal ini adalah sebagai pengawas dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga proses transformasi iptek tersebut sesuai dengan konteks budaya, walaupun sudah mengalami perubahan bentuk, fungsi dan makna. Harapan masyarakat secara umum adalah dapat mencapai kesejahteraan dan menikmati hidupnya sebagai manusia yang merdeka/bebas, artinya manusia hidup perlu bersosialisai dengan lingkungan, bekerja dengan tenang, berkreasi dan menikmati pengembangan teknologi dan budaya secara bebas.

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis budaya di Indonesia sampai saat ini belum signifikan, walaupun sejak pemerintahan reformasi ada suatu usaha-usaha ke arah itu namun masih banyak hambatan dan tantangan yang menghadangnya, sehingga apa yang menjadi harapan bangsa dan masyarakat Indonesia belum dapat dicapai sepenuhnya. Bahkan pada era Orde Baru ada kecenderungan pemerintah untuk melakukan pelumpuhan budaya-budaya tertentu. Maksudnya pemerintah secara sadar dan sistematis meninabobokan kesadaran budaya dan kritis dengan wujud budaya represif dan ekspresif, yang dalam istilah Antonio Gramsci disebut dengan istilah hegemonisasi (Baswir, dkk. 2003 : 220). Hegemoni pemerintah yang bersifat represif dan ekspresif sangat bertentangan dengan hakekat kebudayaan itu sendiri, yakni mengusahakan sesuatu yang dapat menyempurnakan hidup dan kehidupan manusia, bukan sebaliknya. Menyempurnakan dalam hal ini berarti ada usaha untuk memperbaiki dan bukan merusak. Teknologi dan pemikiran-pemikiran pengembangan ekonomi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi juga merupakan hasil budaya. Oleh karena itu pemerintah dalam hal pengembangan ekonomi kapitalistik hendaknya dapat dilandasi oleh budaya-budaya yang adi luhung (budaya Indonesia) sehingga kemajuan ekonomi yang dicapainya dapat diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Realitas saat ini, hukum ekonomi cenderung sangat kapitalistik dan teknologi sebagai anak sulung kapitalis tidak berorientasi pada keutuhan dan kelestarian hidup serta kehidupan alam semesta. Seperti limbah industri, perusakan hutan, polusi, peracunan bumi dan sebagainya merupakan akibat dari teknologi yang tidak disertai sikap budaya yang utuh dan edial (Wibowo, 2007 : 29). Misalnya upacara adat bersih kali di Jawa dan di Bali upacara mapag air adalah salah satu bentuk penghormatan yang ditujukan pada Hyang Widhi sebagai penguasa air (wisnu) sehingga desa memperoleh limpahan kesejahteraan dari Hyang Widhi/Wisnu. Upacara adat atau agama seperti tersebut di atas, di samping merupakan ekspresi spiritual, ternyata mengandung suatu strategi budaya dalam usahanya pelestarian alam lingkungan maupun pengembangan perekonomian rakyat.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Pembangunan ekonomi yang dimotori oleh pemerintahan Orde Baru tahun 1965 boleh dikatakan sangat mengagetkan dunia, sehingga Indonesia dianggap sebagai salah satu macan Asia karena pertumbuhan ekonomi yang sangat menakjubkan, di mana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun tinggi dan konstan serta adanya peningkatan distribusi pendapatan yang cukup baik. Namun sesungguhnya dibalik keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tersebut banyak menimbulkan kesenjangan antara masyarakat kaya (pengusaha) yang memperoleh subsidi modal dari pemerintah dan masyarakat miskin yang selalu terpinggirkan dalam berbagai aspek, akan tetapi menanggung hutang. Misalnya unjuk rasa yang terjadi pada tahun 1974 sebagai puncak kekecewaan masyarakat dan para intelektual maupun mahasiswa, berkaitan dengan modal asing (kasus malari).

Akibat dari kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem perekonomian yang kapitalistik dan individualistik maka masyarakat lebih banyak mengalami kemiskinan secara struktural, baik dalam aspek lingkungan maupun budaya. Karena kebijakan pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah sudah tidak lagi memandang penting itu lingkungan dan budaya, tetapi bagaimana caranya pemerintah dapat memenuhi pendapatan negara dan mengangsur hutang-hutang dari para donatur, sehingga lingkungan hidup dan budaya mengalami kerusakan yang luar biasa. Seperti kerusakan hutan, biota laut, pencemaran tanah, udara, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sesungguhnya pembangunan ekonomi yang berbasiskan kapitalistik yang diterapkan di Indonesia sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena pemerintah Indonesia harus bisa selektif dalam mengambil kebijakan ekonomi makro maupun mikro, sehingga sesuai dengan hakekat Pancasila bahwa perekonomian yang diterapkan adalah perekonomian yang berbasiskan rakyat seperti yang tersurat dalam UUD 1945, pasal 33.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia, hendaknya dapat menerapkan pembangunan ekonomi sesuai dengan landasan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila.
2. Pembangunan ekonomi sedapat mungkin dapat mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
3. Pembangunan ekonomi Indonesia hendaknya disesuaikan dengan budaya yang ada dan berkembang di Indonesia, dan bukan atas budaya orang lain yang sangat tidak cocok dengan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison, dkk. 2003. *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta : ELSAM.
- Damsar, 1997. *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Giddens, Anthony. 2003. *Jalan Ketiga dan Kritik-Kritiknya* (terjemahan oleh Imam Khoiri), Yogyakarta : IRCisoD.
- Keraf, A. Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Kahn, Alfred E. 1989. *The Economocs of Regulation*, Principles and Institutions, Cambridge : The MIT Press.
- Mas'ood, Mohtar. 1999. *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta : Pusat Penelitian UII Press.
- Soetrisno, 1964. *Kapitasalekta Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Wibowo, Fred. 2007. *Kebudayaan menggugat, Menuntut Perubahan Atas Sikap, serta Sistem yang Tidak Berkebudayaan*, Yogyakarta : Pinus Book Publisher.